

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta
- Darussalam, Nurhadi, *Materi Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*, 2017.
- Hadi, Luthfan, 2016, *Hukum Notaris dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Liliana, Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Putusan Hakim Pada Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyoto, *Materi Kuliah Teknik Pembuatan Akta II*, 2017.

Nico, 2003, *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Untuk Mahasiswa Dana Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban,1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

## **C. Tesis**

Diki Sh, “Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Nabila Febrina Adawiyah, “Pembacaan Akta Notaris Melalui Video Conference Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019.

Wirasakati Ibrahim, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta-Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

R. Yudhistira, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Legalisasi Perjanjian Pembiayaan Pada Perusahaan Pembiayaan “X” Ditinjau dari Pasal 16 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Sidah, “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Yesi Andika Mulyadi, “Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat di Hadapan Notaris Dalam Perkara Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.

#### **D. Makalah dan Penelitian**

Dimiru, Ahmad, 2011, “*Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia Dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari UU Jabatan Notaris*”, Makalah Seminar Hukum, Makassar.

#### **E. Internet**

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan>, diakses tanggal 14 September 2018, Pukul 02.45 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>, diakses tanggal 14 September 2018, Pukul 02.45 WIB.